



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2016



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2016**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 dan ini adalah Laporan Kinerja terakhir sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Secara substantif Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Bantul, 20 Pebruari 2017  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Bantul

Drs. SUPRIYANTO, MM  
NIP. 19590527 198201 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I 1_PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
1.4. Potensi Sumber Daya Manuasia (SDM) BKD.....	4
1.5. Sarana dan Prasarana.....	7
1.6. Isu-isu Strategis di Bidang Kepegawaian .....	8
1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	10
2.2. Rencana Strategis (Renstra) BKD Kabupaten Bantul.....	11
2.2.1. Visi .....	11
2.2.2. Misi .....	11
2.2.3. Tujuan .....	12
2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran .....	13
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	18
2.4. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1. Pengukuran Kinerja.....	32
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis.....	34
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	38
3.4. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV.....	49
3.5. Akuntabilitas Keuangan.....	58
3.5.1. Anggaran dan Realisasi APBD .....	59
3.5.2. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan .....	59
3.5.3. Anggaran dan Realisasi Per Indikator Sasaran.....	64
BAB IV P E N U T U P.....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah.....	10
Tabel 2	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Manaj Sumber Daya Aparatur.....	13
Tabel 3	Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Prima Kepegawaian.....	14
Tabel 4	Sasaran Program dan Kegiatan.....	15
Tabel 5	Rencana Kinerja Tahunan BKD.....	18
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2016.....	21
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2016.....	24
Tabel 8	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	33
Tabel 9	Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2016.....	35
Tabel 10	Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2016 per-triwulan.....	36
Tabel 11	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pertama.....	39
Tabel 12	Standar Operasional Prosedur (SOP).....	43
Tabel 13	Hasil IKP per unsur.....	46
Tabel 14	Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2016.....	50
Tabel 15	Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2016.....	54
Tabel 16	Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2016.....	59
Tabel 17	Anggaran dan Realisasi Kegiatan Tahun 2016.....	60
Tabel 19	Anggaran dan Realisasi Per-sasaran.....	64

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016.....	4
Grafik 2	Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Golongan Tahun 2016.....	5
Grafik 3	Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Per 31 Desember 2016 Berdasarkan Usia Kabupaten Bantul .....	6
Grafik 4	Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016.....	7
Grafik 5	Data Aset BKD Kabupaten Bantul Tahun 2016.....	8
Grafik 6	Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur Th 2016.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi BKD .....	3
Gambar 2 Aplikasi Bantul APPs.....	37
Gambar 3 Aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Aplikasi e-Formasi .....	40

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan 2 Misi, 2 Tujuan, 2 Sasaran, 6 Program dan 41 Kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp5.510.471.550,00 terealisasi Rp 4.792.078.993,00 atau 87%.

Hasil pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja Permenpan Nomor 54 Tahun 2010 dengan nilai rata-rata telah tercapai **97.04** atau telah direalisasikan dengan kriteria penilaian "**Sangat Tinggi**". Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja disimpulkan bahwa indikator kinerja kriteria penilaian "**Sangat Tinggi**". Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2016 sudah dilaksanakan dengan baik dan akan dipertahankan dan ditingkatkan pada Tahun berikutnya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap organisasi publik saat ini diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Pelaporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Pelaporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Kabupaten Bantul Tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan



berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.

### **1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. Sedangkan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2008 .

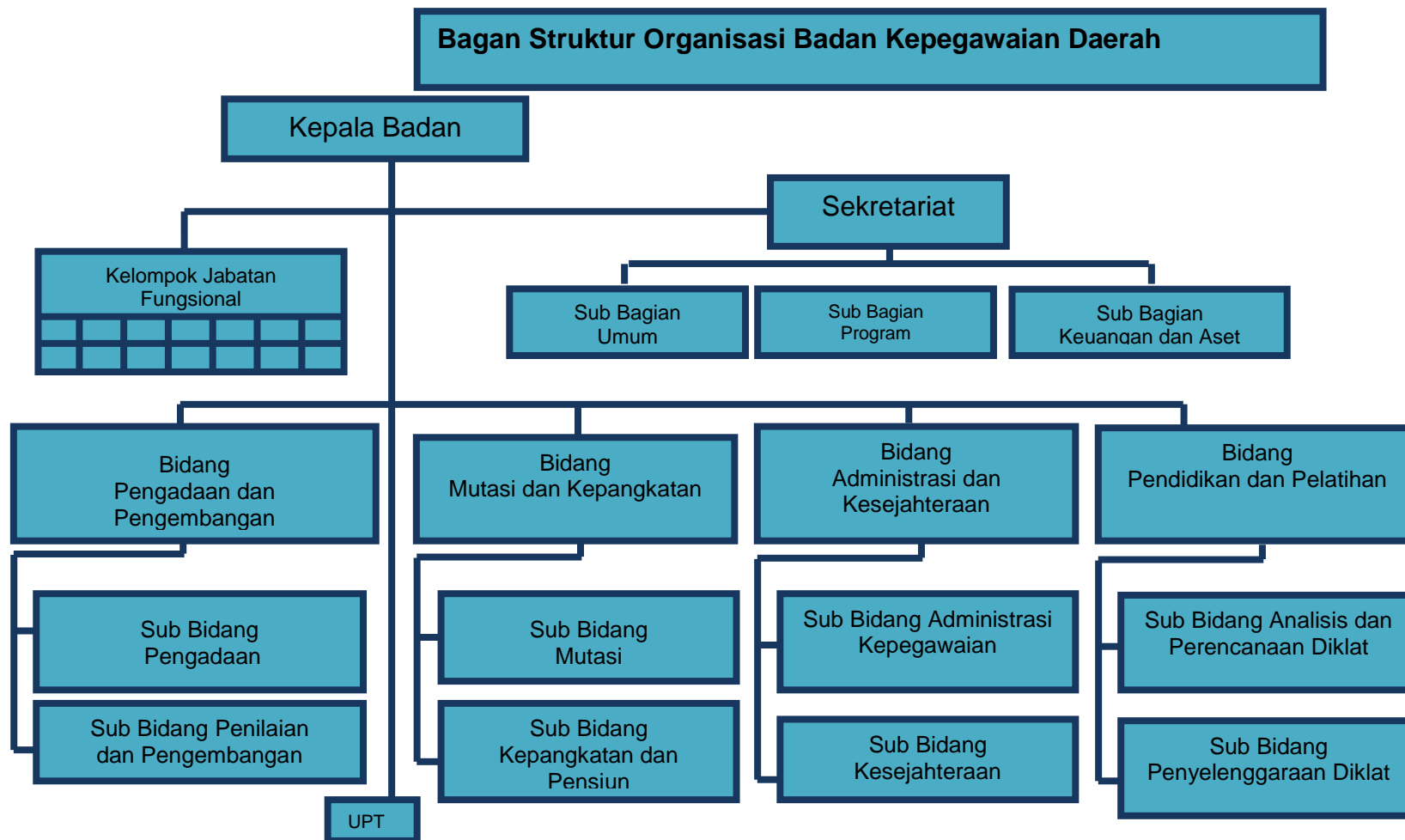
Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah adalah pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Badan Kepegawaian Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul :



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BKD Kabupaten Bantul

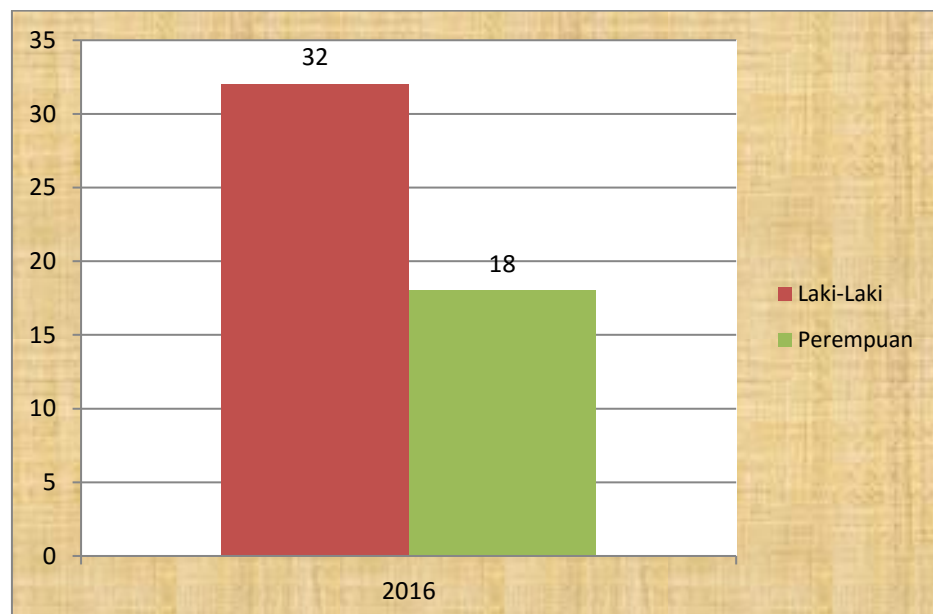
#### 1.4. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kepegawaian Daerah

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang mempunyai keahlian atau kompetensi merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari 1 (satu) eselon II, lima (5) eselon III dan 11 eselon IV. Data pegawai per 31 Desember 2016 adalah 51 orang dengan perincian 32 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Berikut perkembangan data pegawai Badan Kepegawaian Daerah dari Tahun 2016 :

- a. Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Per 31 Desember Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

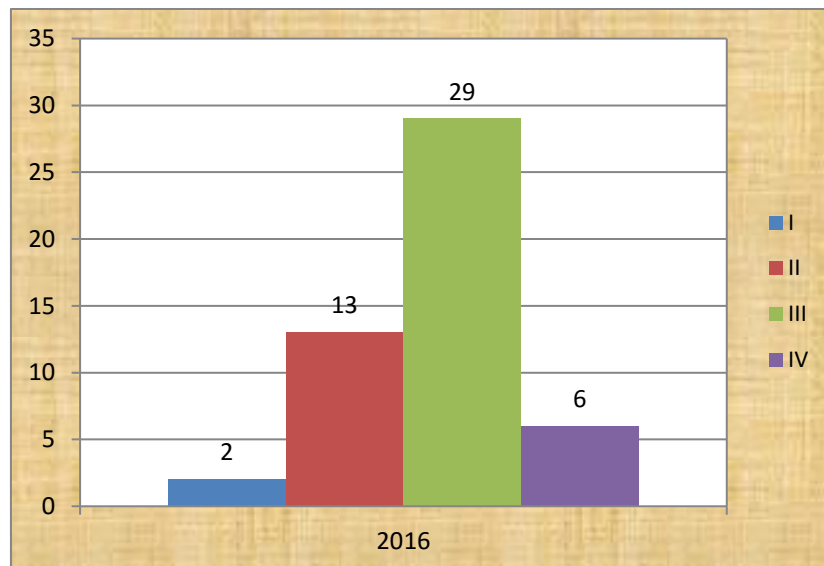
**Grafik 1**  
**Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016**



Dilihat dari komposisi jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin laki-laki di Badan Kepegawaian Daerah lebih banyak dari Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin perempuan, tapi hal ini tidak menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah setiap tahunnya.

- b. Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Per 31 Desember Berdasarkan Golongan 2016 sebagai berikut :

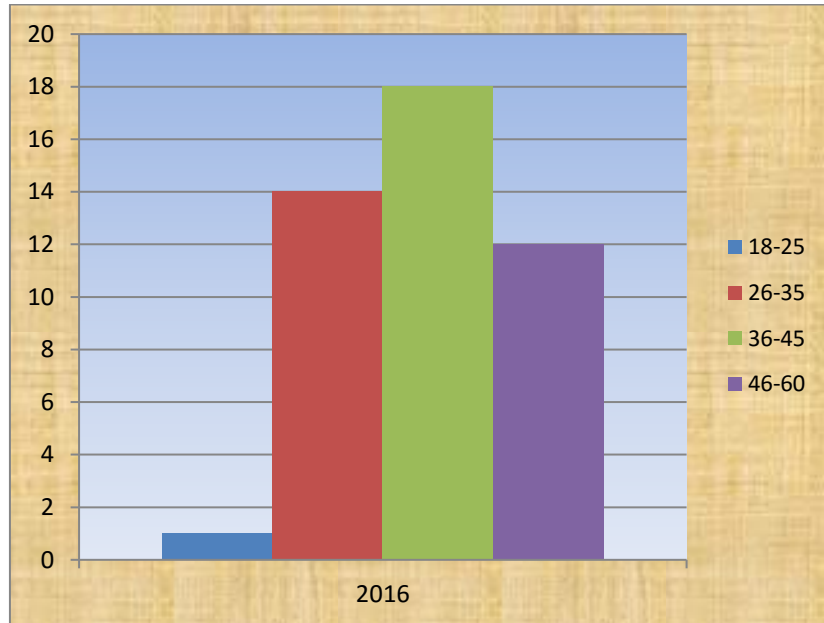
**Grafik2**  
**Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah**  
**Kabupaten Bantul Per 31 Desember**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2016**



Dilihat dari grafik diatas Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yang mempunyai Golongan III dan Golongan II yang lebih banyak hal ini merupakan faktor pendukung akan tercapainya kinerja organisasi.

- c. Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Usia Tahun 2016 :

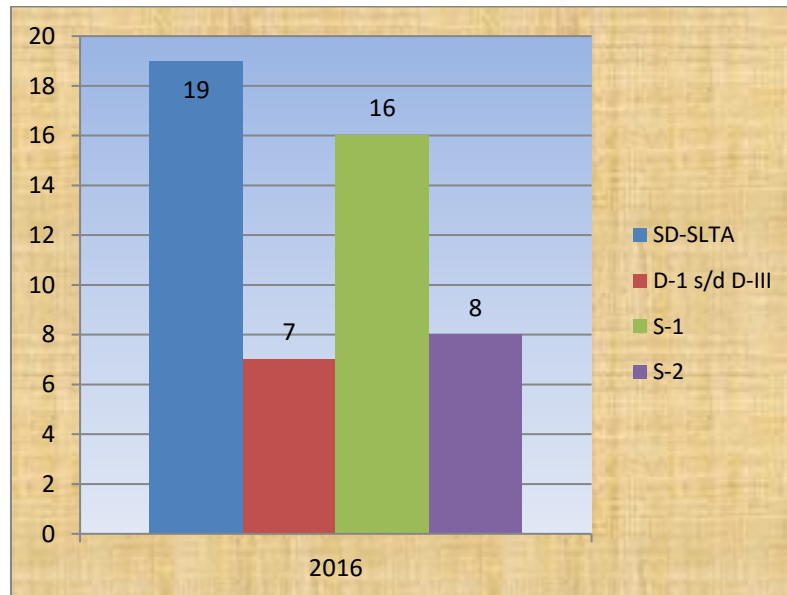
**Grafik3**  
**Data Pegawai Negeri Sipil**  
**Badan Kepegawaian Daerah Per 31 Desember 2016**  
**Berdasarkan Usia Kabupaten Bantul**



Dilihat dari grafik diatas Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul banyak yang berada di rentang usia optimal untuk melaksanakan pekerjaan, ini adalah salah satu faktor pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi.

- d. Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Per 31 Desember Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 :

**Grafik4**  
**Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah**  
**Kabupaten Bantul Per 31 Desember**  
**Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016**

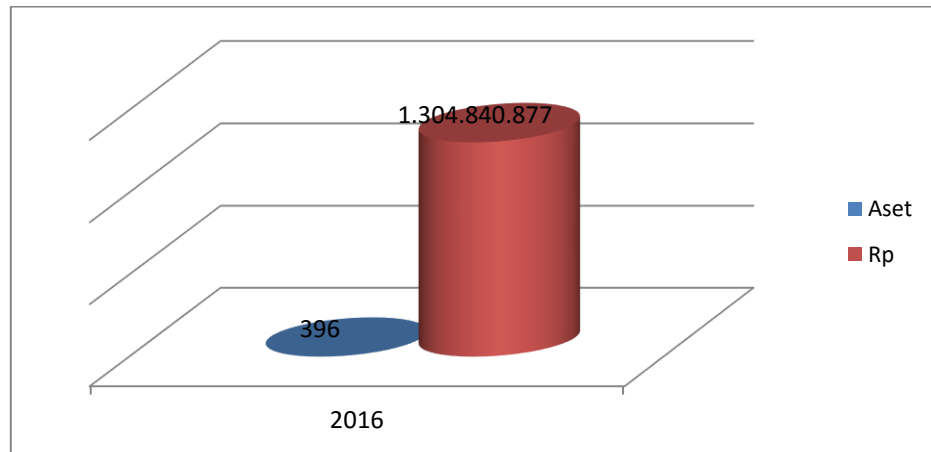


Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil merupakan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi, dengan adanya kapasitas sumber daya aparatur yang memadai maka akan mampu untuk mencapai target yang telah direncanakan organisasi, dilihat dari grafik diatas Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yang berpendidikan DI keatas 50% lebih banyak dari yang mempunyai pendidikan SLTA kebawah.

**1.5. Sarana dan Prasarana**

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul mempunyai aset sampai dengan Desember 2016 sebanyak 396 aset atau sebesar **Rp 1.304.840.877,00**. Dari Tahun ke tahun aset yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul semakin meningkat, hal ini bertujuan agar pelayanan kepada pegawai semakin baik. Berikut Aset yang dimiliki BKD dari Tahun 2016:

**Grafik5**  
**Data Aset Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul**  
**Tahun 2016**



### 1.6. Isu-isu Strategis di Bidang Kepegawaian

Isu-isu strategis yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kinerja SDM aparatur pemerintah belum optimal yang disebabkan oleh kompetensi SDM belum optimal, hal ini karena belum adanya standar kompetensi manajerial
2. Pengembangan kompetensi aparatur belum optimal, belum terwujudnya analisa kebutuhan Diklat yang didasarkan pada standar kompetensi jabatan.
3. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan aparatur dan kesadaran dari SKPD untuk melaporkan tentang adanya kasus indisipliner.

4. Jumlah ASN dengan kualifikasi tertentu belum memadai  
Masih banyaknya jabatan fungsional tertentu yang belum diisi karena membutuhkan kualifikasi tertentu yang menjadi persyaratannya.
5. Pelayanan kepegawaian yang masih perlu ditingkatkan, nilai indeks kepuasan aparatur masih dibawah target.

### **1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul tahun 2014 adalah sebagai berikut :

#### **Bab I. Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas tentang Pendahuluan, Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja dibuat, Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi, Potensi SDM, Isu-isu Strategis di bidang kepegawaian yang dihadapi oleh organisasi, dan sistematika penyajian

#### **Bab II. Perencanaan Kinerja**

Memuat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

#### **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

Berisi penjelasan singkat tentang Pengukuran Kinerja, Pencapaian Sasaran Strategis, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

#### **Bab IV. Penutup**

Berisi ringkasan atau kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan langkah ke depan untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah menetapkan 2 Indikator Kinerja Utama yang diharapkan dapat menggambarkan keberhasilan yang dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, berikut Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah :

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket
			2016	
1	Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	90%	Formulasi pengukuran: Jumlah aparatur yang sesuai kompetensi dibagi jumlah total aparatur dikali seratus persen
2	Meningkatnya pelayanan bagi aparatur	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	73%	Kategori Mutu Pelayanan dikatakan baik jika Hasil Survey Indeks Kepuasan Aparatur rentang nilai antara 62,51 - 81,25 81.25

## **2.2. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul**

Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 telah direview pada Tahun 2016. Review meliputi Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis, berikut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang tercantum dalam Review Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016:

### **2.2.1. Visi**

**Visi** Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yang telah dirumuskan dan disepakati bersama adalah “Menjadi Pengelola Kepegawaian yang Profesional dan Berkualitas”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul ingin mewujudkan sebagai pengelola kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme Sumber Daya Aparatur dengan yang mempunyai kualitas yang baik sesuai standar. Sehingga dapat mendukung misi Kabupaten Bantul yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.

### **2.2.2. Misi**

Visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada

misi tersebut. Dari visi yang telah ditetapkan dapat dirumuskan **Misi** yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Sumber Daya Aparatur.
2. Meningkatkan pelayanan prima kepegawaian.

### **2.2.3. Tujuan**

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari penyertaan misi organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (*what*) dan kapan akan dicapai (*when*). Pernyataan tujuan bersifat lebih nyata, mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang akan diambil.

**Tujuan** penyelenggaraan Pemerintahan di Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2016 yang merupakan implementasi dari misi yang terangkum dalam review rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur.
2. Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian.

#### 2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

Sasaran atau objektifitas organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan, sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas dapat ditetapkan rumusan **sasaran** sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar
2. Meningkatnya pelayanan bagi aparatur

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan misi yang telah ditetapkan :

**Tabel 2**

**Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Sumber Daya Aparatur**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur

**Tabel 3**

**Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Prima Kepegawaian**

	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepegawaian	1 Meningkatnya pelayanan bagi aparatur	1 Nilai Indeks Kepuasan Aparatur

Dalam rangka mengimplikasikan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, maka direncanakan Sasaran, Program dan Kegiatan. Pada Tahun 2016, Sasaran, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Sasaran Program dan Kegiatan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Kegiatan
1	Terciptanya Manajemen Kepegawaian Yang Berkualitas	Presentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	Presentase	90	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
						Uji Kesehatan
						Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
						Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
						Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Kegiatan
2	Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	Presentase	73	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan IKM
						Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
						Seleksi Praja IPDN dan Monitoring
						Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
						Penanganan ijin bercerai PNS
						Penyusunan formasi jabatan / standar kompetensi jabatan
						Penempatan PNS
						Pengelolaan administrasi kesejahteraan PNS
						Penyusunan formasi pegawai
						Kenaikan pangkat dan pensiun

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Kegiatan
						Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
						Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai
						Seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama
						Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
						Pelaporan LP2P dan LHKPN
						Seleksi penerimaan Calon PNS
						Kesekretariatan Tim PAK jabatan fungsional
						Pengelolaan data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)



### 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja merupakan dokumen rencana kinerja yang memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Berikut Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016

**Tabel 5**  
**Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah**  
**Tahun 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	Presentase	90	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase	90
2	Meningkatnya pelayanan bagi aparatur	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	nilai	73.98	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentase	73

## **2.4. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Permenpan No. 54 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja tidak hanya dilakukan oleh Kepala SKPD tetapi eselon dibawahnya juga membuat perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja Eselon III memuat sasaran strategis, program utama/pendukung sasaran, indikator kinerja program, target kinerja tahunan, dan anggaran program. Masing-masing eselon III memperjanjikan kinerjanya (bertandatangan) kepada kepala SKPD. Sedangkan untuk perjanjian kinerja eselon IV memuat, sasaran strategis, program utama/pendukung, kegiatan, indikator kinerja output atau outcome awal, dan anggaran kegiatan. Masing-masing eselon IV memperjanjikan kinerjanya (bertanda tangan) kepada eselon III dan diketahui kepala SKPD nya.

Penerapan perjanjian kinerja pada tingkat eselon III dan eselon IV menjadi momentum penting bagi penerapan SAKIP ke level berikutnya, bukan sekedar akuntabilitas semata. Harapannya, kinerja setiap level manajemen menjadi lebih terukur, memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja dan perbaikannya, dan tentu saja sebagai dasar pemberian penghargaan dan hukuman sehingga perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat dapat terus diperbaiki.

Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 dilakukan dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 dan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 APBD. Berikut Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul :

### **Perjanjian Kepala Badan Kepegawaian Daerah / Eselon II**

## Perjanjian Kepala Badan Kepegawaian Daerah / Eselon II



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Supriyanto, MM  
 Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul  
 selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Suharsono  
 Jabatan : Bupati Bantul  
 selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, Januari 2016



Bupati Bantul  
**Drs. H. Suharsono**

Bantul, Januari 2016



Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
**Drs. Supriyanto, MM**  
NIP. 195906271982011002


### Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumusan Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	Jumlah pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan dan ABK oleh kompetensi individu dibagi jumlah formasi yang sudah terisi dikali seratus persen	%	90
2	Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan	Jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah kebutuhan pegawai dikali seratus persen	%	73


Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp 3.197.651.700,00	APBD
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp 1.980.984.450,00	APBD

Bantul, Januari 2016



Bupati Bantul  
**Drs. H. Suharsono**

Bantul, Januari 2016



Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
**Drs. Supriyanto, MM**  
NIP. 195906271982011002

**Tabel 6**  
**Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2016**

No	Sekretaris / Kepala Bidang	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
1	Sekretaris	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan sumberdaya, kapasitas dan profesionalisme aparatur	Capaian Nilai AKIP	%	80	251.820.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	92	251.820.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	nilai	78	5.195.500
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Ketepatan waktu pengiriman	%	100	3.100.000
2	Bidang Administrasi dan Kesejahteraan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya administrasi dokumen kepegawaian	Presentase keakuratan data ASN	%	15	<b>158,577,750</b>

No	Sekretaris / Kepala Bidang	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
				Persentase verifikasi pengusulan Penghargaan ASN	%	100	
				Persentase ketepatan waktu verifikasi usulan tambahan penghasilan	%	95	
3	Bidang Mutasi dan Kepangkatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ketepatan pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun	Persentase Penempatan PNS sesuai dengan analisa jabatan dan ABK	%	100	<b>729,045,050</b>
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penempatan ASN	Persentase ketepatan realisasi usulan dokumen kepegawaian	%	97	
4	Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya perencanaan kebutuhan pegawai	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	%	17	<b>583,768,850</b>
			Meningkatkan disiplin dan pengembangan karir PNS	Penanganan disiplin PNS	%	100	
				Persentase ketepatan waktu verifikasi Penilaian Angka Kredit	%	100	

No	Sekretaris / Kepala Bidang	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
			Meningkatkan kompetensi	Persentase penilaian potensi dan kompetensi	%	24	
5	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatknya kapasitas dan kompetensi PNS	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	%	7	<b>3,481,727,000</b>
				Persentase permohonan ijin belajar dan tugas belajar sesuai kompetensi PNS	%	100	

**Tabel 7**  
**Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2016**

No	Sub Bagian/Sub Bidang	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
1	Sekretariat BKD	Penyediaan jasa surat menyurat	Kegiatan ketatausahaan BKD berjalan dengan baik	Jumlah materai/prangko	lembar	1050	4.050.000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah waktu penggunaan jasa komunikasi	bulan	12	2,400,000
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah surat-surat kendaraan dinas	unit	20	5,500,000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	macam	14	2,709,000
		Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah pengadaan alat tulis kantor	bulan	4	13.185.700
		Penyediaan barang cetak dan penggandaan		Jumlah barang cetak/penggandaan	lembar	32.500	9,250,000
		Penyediaan barang cetak dan penggandaan		Jumlah barang cetak/penggandaan	lembar	32.500	9,250,000

No	Sub Bagian/Sub Bidang	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eksemplar	15	3,900,000
		Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu	ok	870	13,100,000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	oh	100	155.260.000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	oh	105	9.750.000
2	Sub Bagian Program	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah draft rencana strategis	dokumen	1	1.550.000
		Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Penyusunan laporan kinerja	Jumlah draft rencana kerja	dokumen	1	1.550.000
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan kinerja	Jumlah draft laporan kinerja	Dokumen	5	6.885.500



No	Sub Bagian/Sub Bidang	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
			Penyusunan laporan IKM	Jumlah draft laporan IKM	dokumen	2	
3	Sub Bidang Keuangan dan Aset	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan kegiatan SKPD berjalan lancar	Administrasi keuangan kegiatan SKPD berjalan lancar	bulan	12	37.380.200
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas	kali	88	151.640.000
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	kali	20	30.680.000
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	8	69.500.000

No	Sub Bagian/Sub Bidang	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
4	Sub Bidang Administrasi	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Pemverifikasian PNS yang wajib melaporkan LP2P dan LHKPN	Jumlah PNS yang melaporkan LP2P dan LHKPN	orang	9237	40.708.750
5	Sub Bidang Kesejahteraan	Penanganan Kasus-kasus	Penanganan ijin perceraian PNS	Jumlah surat ijin melakukan perceraian PNS	SK	15	2.926.000
		Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Pemverifikasian usulan satya lancana	Jumlah satya lancana yang diusulkan	orang	630	36.126.000
		Pengelolaan administrasi kesejahteraan PNS	Penanganan administrasi dokumen kepegawaian	Jumlah usulan Karis, Karsu, Karpeg, Kartu Taspen, Pengembalian Taperum dan Cuti PNS	orang	850	10.497.000
6	Sub Bidang Mutasi	Penempatan PNS	Pemenuhan kebutuhan PNS	Jumlah PNS yang mutasi	orang	3500	122.544.050
		Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama			orang	48	482.795.000

No	Sub Bagian/Sub Bidang	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
7	Sub Bidang Kependidikan dan Pensiun	Kenaikan pangkat dan pensiun	Penanganan administrasi kenaikan pangkat dan pensiun	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	orang	1800	123.706.000
		Pengelolaan data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	Penanganan administrasi kenaikan pangkat dan pensiun secara online dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun yang dientry dalam SAPK	orang	1800	39.062500
8	Sub Bidang Pengadaan	Penyusunan formasi pegawai	Tersusunnya kebutuhan PNS	Jumlah usulan formasi PNS	formasi	3.008	34.143.500
		Seleksi penerimaan calon PNS	Terlaksananya seleksi CPNS dan pengelolaan PTT	Jumlah yang mengikuti seleksi CPNS	orang	140	160.756.000
				Jumlah PTT yang mempunyai SK Bupati	orang	11	
9	Sub Bidang Penilaian dan Pengembangan	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Penanganan disiplin PNS	Jumlah SK Hukuman Disiplin	SK	15	14.005.000

No	Sub Bagian/Sub Bidang	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
		Kesekretariatan Tim PAK Jabatan Fungsional	Pemverifikasian PAK Jabatan Fungsional	Jumlah PAK yang diverifikasi	orang	7000	35.953.500
		Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Peta kinerja PNS	Jumlah PNS yang mengikuti assement	orang	285	260.792.000
			Penyusunan formasi jabatan/standar kompetensi jabatan		jabatan	6	32.518.650
		Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah	Fasilitasi ujian dinas	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi ujian dinas	orang	83	25.190.200
		Uji Kesehatan	Fasilitasi uji kesehatan	Jumlah PNS yang di uji kesehatan	orang	31	20.410.000
10	Sub Bidang Analisis dan Perencanaan Diklat	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Penanganan Ijin Belajar dan Tugas Belajar	Jumlah PNS yang memenuhi syarat mendapatkan ijin belajar dan tugas belajar	orang	135	248.483.500
		Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	Penanganan seleksi IPDN	Jumlah calon praja yang diterima IPDN	calon praja	62	22.884.000

No	Sub Bagian/Sub Bidang	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
11	Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Penyelenggaraan dan fasilitasi diklat struktural, teknis, fungsional, bintek dan kursus-kursus	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan teknis	orang	291	238.521.050
		Pendidikan penjenjangan struktural		Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural	orang	145	2.594.056.500
		Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah		Jumlah PNS yang mengikuti kursus, bintek	orang	22	248.143.450
		Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah		Jumlah PNS fungsional yang mengikuti diklat	orang	80	129.638.500

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

### 3.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah

Kerangka Pengukuran kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**Tabel 8**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.



### (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

## **1.2. Pencapaian Sasaran Strategis**

Implementasi reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan mengingat penyelenggaraan pemerintah saat ini dihadapkan dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia merupakan penggerak birokrasi pemerintah harus ikut serta dalam perubahan mendasar menuju pemerintah yang baik dan bersih.

Dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat beberapa esensi pokok yang terkandung yakni bagaimana mewujudkan semua jabatan yang ada pada instansi pemerintah sebagai sebuah profesi Aparatur Sipil Negara yang akan memperkuat eksistensi dari para aparatur, memantapkan peran Pegawai Negeri Sipil sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dari intervensi politik, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan, membangun sistem informasi manajemen kepegawaian yang akuntabel, menerapkan sistem penggajian skala tunggal, menciptakan kinerja PNS dan mengimplementasikan merit sistem.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2016 ini melakukan berbagai strategi dan kebijakan agar apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut tercapai.

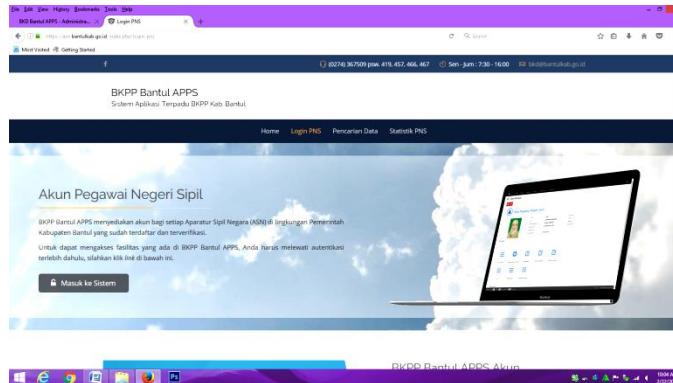
Berikut capaian kinerja Tahun 2016 :

**Tabel 9**  
**Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2016**

No	Sasaran	Tahun 2016			
		Target	Capaian Kinerja	Prosentase	Kategori
1	Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar	90	84	93.33	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pelayanan bagi aparatur	73	73.55	100.75	Sangat Tinggi
	Nilai Rata-Rata			97,04	Sangat Tinggi

**Tabel 10**  
**Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2016 per-triwulan**

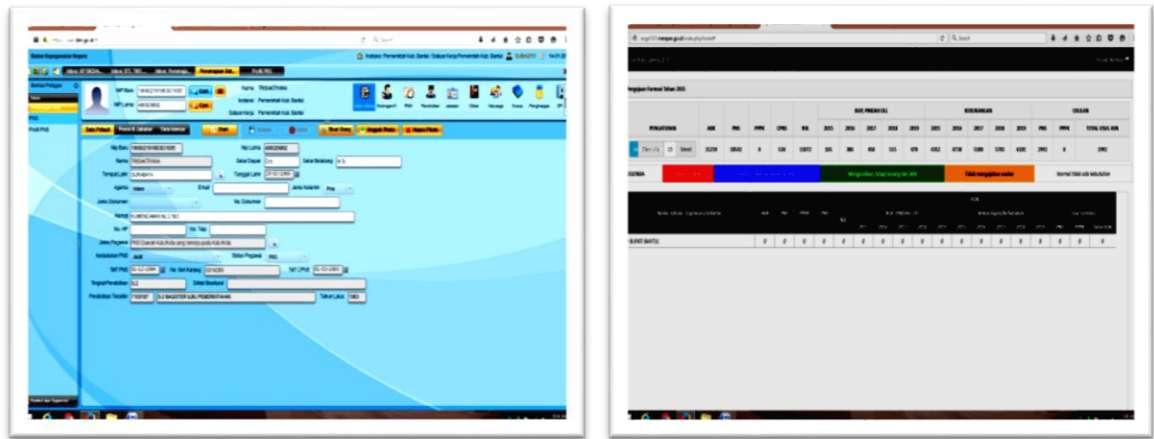
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	Presentase	90	Triwulan 1	0	0	0
					Triwulan 2	0	0	0
					Triwulan 3	0	0	0
					Triwulan 4	90	84	93,33
2	Meningkatnya pelayanan bagi aparatur	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	nilai	73	Triwulan 1	0	0	0
					Triwulan 2	74	72,52	98
					Triwulan 3	0	0	0
					Triwulan 4	73,98	73,55	99,42



**Gambar 2**  
Sistem Aplikasi BKD Bantul Apps

Dilihat dari Tabel diatas Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dari Tahun 2016 kategorinya sama yaitu “Tinggi” . Pada Tahun 2016 ini sudah ada pembangunan sistem aplikasi untuk mempermudah proses pekerjaan seperti Aplikasi Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai, Aplikasi Penilaian Kinerja Guru dan Aplikasi Penilaian Angka Kredit dan selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul akan membangun Sistem Aplikasi Terpadu BKD Kabupaten Bantul (BKD Bantul Apps).

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul selain menggunakan sistem aplikasi pegawai SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang merupakan sistem online Kenaikan Pangkat dan Pensiun juga menggunakan sistem aplikasi e-Formasi yaitu sistem aplikasi yang dibangun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mempermudah dalam penentuan kebutuhan pegawai.



**Gambar 3**  
**Aplikasi (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Aplikasi e-Formasi**

### 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

#### 1. Sasaran Pertama “Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar.”

Terciptanya Manajemen Kepegawaian Yang Berkualitas berkaitan erat dengan Good Governance. Undang- Undang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa Badan Kepegawaian Negara harus menjalankan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari awal sampai dengan pensiun dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul membantu Fungsi Badan Kepegawaian Negara di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran pertama Tahun 2016 sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Pertama**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016			
		Target	Realisasi	Prosentase	Kriteria Penilaian
1	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	90%	84%	93.33	Sangat Tinggi

Capaian Sasaran pada Sasaran Pertama :

$$1. \text{ Sangat Tinggi} \quad \frac{1 \times 92.5}{1} = 92.50$$

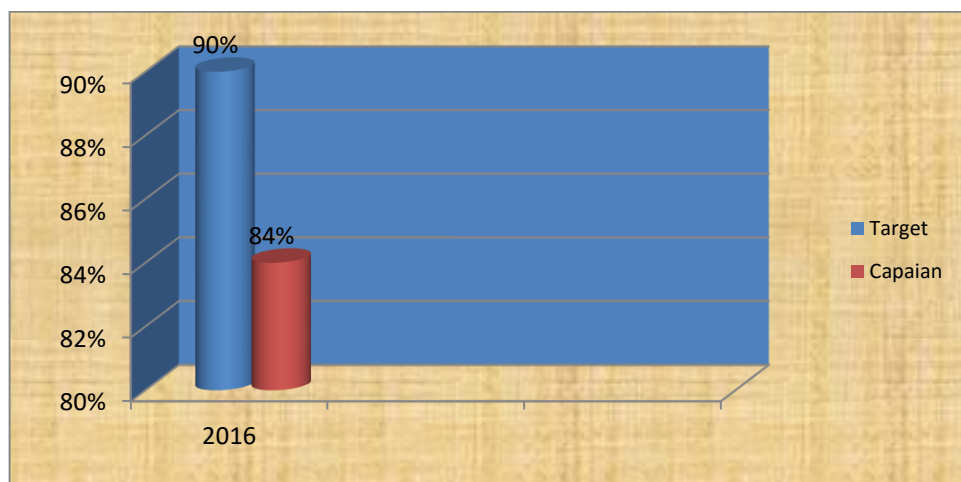
$$\text{Capaian Sasaran Pertama} = 92.50$$

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 1, yaitu " Meningkatkan Kualitas Manajemen Sumber Daya Aparatur " dan tujuan 1, yaitu " Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur". Sasaran Strategis 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan kriteria penilaiannya " **Sangat Tinggi**", sehingga dapat disimpulkan untuk Capaian Sasaran Strategis Pertama kriteria penilaiannya " **Sangat Tinggi**"

Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 1 (satu) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

Persentase pemenuhan kompetensi aparatur adalah termasuk dalam Indikator Kinerja Utama dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, berikut capaian dari Tahun 2016 :

**Grafik 6**  
**Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur Tahun 2016**



Dilihat dari Grafik diatas pada tahun 2016 Persentase pemenuhan kompetensi aparatur mencapai 84 % dengan target 90%. Formulasi untuk mencapai target ini adalah Jumlah aparatur yang sesuai kompetensi dibagi jumlah total aparatur dikali 100%. Faktor yang menjadi penghambat adalah Dalam Peraturan Bupati tentang Analisa Jabatan Nomor 97 Tahun 2016 hanya menyebut jenjang pendidikan belum sampai ke jurusan pendidikan dan jumlah yang dibutuhkan.

Faktor pendukung indikator ini adalah adanya Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan untuk jabatan fungsional umum telah dilakukan beberapa kali sosialisasike SKPD se Kabupaten Bantul.

Indikator sasaran tersebut dicapai melalui 3 program yaitu :

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan Penjurusan Struktural, dan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur meliputi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah dan Uji Kesehatan.
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur meliputi kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS, Penempatan PNS, Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN, Penyusunan Formasi Pegawai, dan Pelaporan LP2P dan LHKPN.



Strategi untuk kedepannya adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan melakukan penempatan SDM sesuai dengan analisa jabatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Anggaran untuk mendukung indikator sasaran tersebut sebesar Rp 3.255.959.700 terealisasi sebesar Rp 3.203.134.886 atau sebesar 98% .

## 2). Sasaran Kedua“ **Meningkatnya pelayanan bagi aparatur.**”

Dalam menjalankan perannya, pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik dan demikian pentingnya pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga sering dijadikan indikator keberhasilan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga dengan program reformasi nasional, tidak akan ada artinya apa-apa manakala pelayanan publik ternyata masih buruk. Apalagi dalam rangka mewujudkan *good governance* dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik harus mampu memberikan pelayanan yang akuntabel (pelayanan prima) di sektor publik yang tidak bisa ditunda-tunda.

Untuk menerapkan pelayanan prima, harus diciptakan dahulu hal-hal yang menjadi standar pelayanan prima. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan. Standar ini harus dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan (masyarakat). Standar pelayanan merupakan

ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan, wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan.

Upaya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dalam memudahkan tugasnya dan melaksanakan satu langkah reformasi birokrasi adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terdiri 56 Standar Operasional Prosedur. Berikut Data Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul :

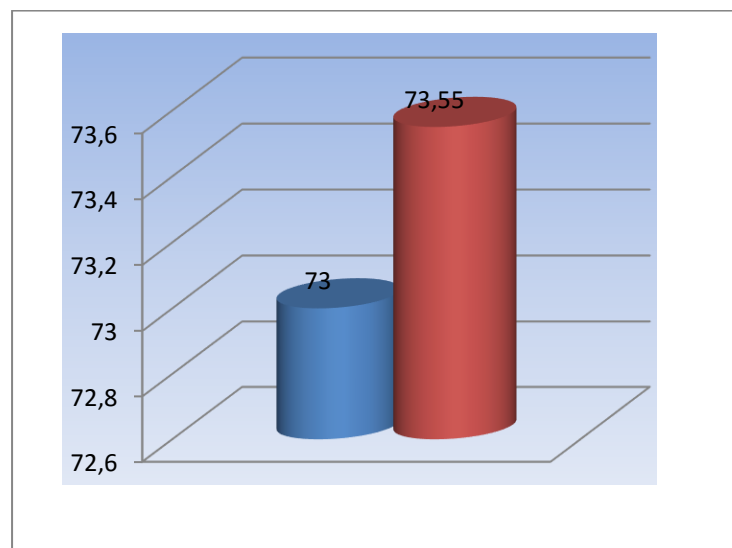
**Tabel 12**  
**Standar Operasional Prosedur (SOP)**  
**Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul**

No	Nama SOP
1	SOP Pembuatan Ijin Belajar
2	SOP Surat Keputusan Tugas Belajar
3	SOP Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS
4	SOP Penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional
5	SOP Pengiriman Peserta Diklat ke Lembaga Diklat
6	SOP Penerimaan Tamu Observasi Lapangan
7	SOP Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
8	SOP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
9	SOP Usulan Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG)
10	SOP Usulan Penerbitan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS)
11	SOP Usulan Penerbitan Kartu Peserta Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen)
12	SOP Penerbitan Surat Izin Cuti Besar
13	SOP Penerbitan Surat Izin Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)
14	SOP Pemberian Izin Perceraian
15	SOP Pemberian Tambahan Penghasilan
16	SOP Pengesahan Formulir Pengembalian Tabungan Perumahan (TAPERUM)

No	Nama SOP
17	SOP Mutasi Antar Instansi
18	SOP Mutasi Masuk ke Pemerintah Kabupaten Bantul
19	SOP Mutasi Keluar dari Kabupaten Bantul
20	SOP Pelayanan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
21	SOP Pelayanan Pensiun BUP Golongan IV/b ke bawah
22	SOP Pelayanan Pensiun BUP Golongan IV/c ke atas
23	SOP Pelayanan Pensiun Atas Permintaan Sendiri Golongan III/d kebawah
24	SOP Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum
25	SOP Assesment
26	SOP Penetapan Hukuman Disiplin Bagi PNS
27	SOP Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijasah
28	SOP Pelaksanaan Uji Kesehatan
29	SOP Pengelolaan Dokumen DP3
30	SOP Penilaian Angka Kredit (PAK)
31	SOP Pelaksanaan Ujian Dinas
32	SOP Surat Masuk
33	SOP Surat Keluar
34	SOP Legalisasi Dokumen Kepegawaian
35	SOP Kenaikan Pangkat
36	SOP Kenaikan Gaji Berkala
37	SOP Pengelolaan Gaji
38	SOP Pelayanan Berkas Usulan Batas Usia Pensiun (BUP)
39	SOP Pembuatan KIR
40	SOP Penghapusan Barang
41	SOP RKBM
42	SOP Laporan Semester Barang Daerah
43	SOP Mutasi Barang Daerah
44	SOP Pengelolaan Persediaan Barang
45	SOP Penyusunan Laporan Tugas Pokok dan Fungsi
46	SOP Penyusunan Bahan LKPJ
47	SOP Penyusunan Bahan LPPD
48	SOP Penyusunan Rencana Kinerja

No	Nama SOP
49	SOP Penyusunan RKA
50	SOP Penyusunan Renstra
51	SOP Penyusunan LAKIP
52	SOP Pengajuan SPP/SPM
53	SOP Pengajuan SP2D
54	SOP Pencairan SP2D UP/GU/TU/LS
55	SOP Pertanggungjawaban SPJ
56	SOP Laporan Keuangan Sistem Akuntansi

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 2, yaitu " Meningkatkan Pelayanan Prima Kepegawaian" dan tujuan 2, yaitu " Terwujudnya Pelayanan Prima Kepegawaian ". Sasaran kedua ini terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Kepuasan Aparatur



Grafik 10  
Indeks Kepuasan Aparatur

Dilihat dari grafik diatas IKP dengan target 73 tercapai 73.55 dan berdasarkan pengukuran kinerja kriteria penilaiannya "**Sangat Tinggi**". IKP (Indeks Kepuasan Pegawai) merupakan Indikator Kinerja Utama yang

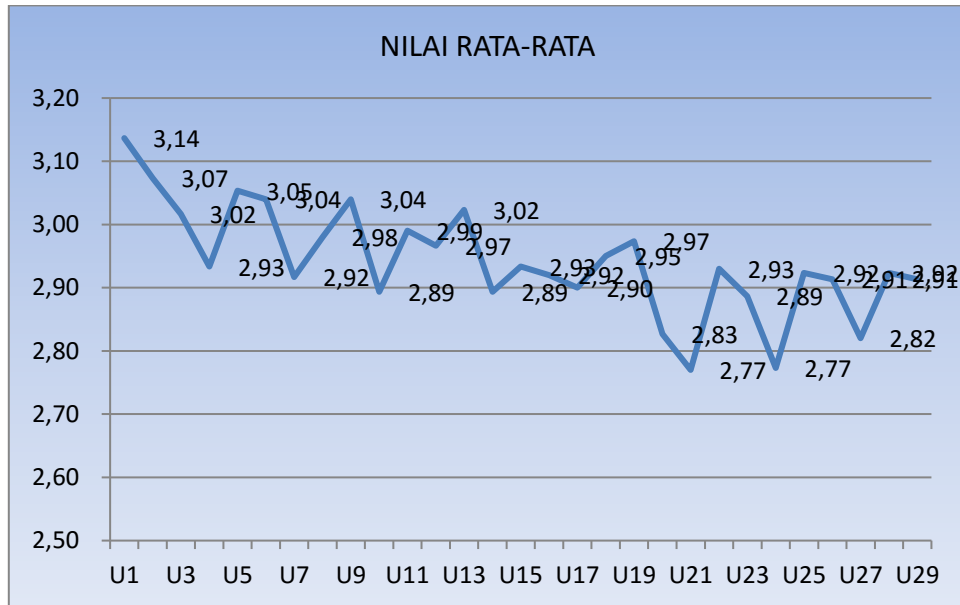
kedua. Indeks Kepuasan Pegawai dijadikan Indikator Kinerja Utama karena dalam sebuah organisasi kepuasan kerja secara menyeluruh merupakan hal yang penting. Kepuasan pegawai merupakan suatu prasyarat untuk meningkatkan produktifitas, tanggung jawab, kualitas, loyalitas dan pelayanan (customer service) dari organisasi bersangkutan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul mulai Tahun 2013 melakukan survey kepuasan pegawai. Para pegawai yang merasa puas merupakan suatu prasyarat untuk meningkatkan produktifitas, tanggung jawab, kualitas, dan pelayanan. Survey tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Bantul

Berikut hasil IKP per unsure pada Tahun 2015 dengan responden sebanyak 290 orang.

**Tabel 13**  
**Hasil IKP per unsur**

<b>NO</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>NILAI RATA-RATA</b>
1	Kemudahan pelayanan	3.14
2	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3.07
3	Kejelasan dan kepastian petugas	3.02
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	2.93
5	Tanggung jawab petugas pelayanan	3.05
6	Kemampuan petugas pelayanan	3.04
7	Kecepatan pelayanan	2.92
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	2.98
9	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan	3.04
10	Ketepatan pelaksanaan jadwal waktu pelayanan	2.89

<b>NO</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>NILAI RATA-RATA</b>
11	Kemampuan merespon masukan atau usulan	2.99
12	Kenyamanan Lingkungan	2.97
13	Keamanan Lingkungan dan sarana prasarana	3.02
14	Pelayanan PAK Jabatan Fungsional	2.89
15	Penanganan Disiplin	2.93
16	Pelayanan Ujian Dinas	2.92
17	Pelayanan Uji Kesehatan	2.90
18	Pelayanan pengelolaan penilaian prestasi kerja	2.95
19	Pelayanan pengusulan Karis, Karsu, Karpeg dan kartu Taspen	2.97
20	Prosedur mendapatkan penghargaan satya lencana karya satya	2.83
21	Pelayanan pengusulan Taperum	2.77
22	Keakuratan data kepegawaian	2.93
23	Prosedur kenaikan Pangkat dan pensiun	2.89
24	Prosedur mutasi jabatan dan atau tempat kerja	2.77
25	Pelayanan kenaikan pangkat dan pension	2.92
26	Fasilitas pelaksanaan diklat/bintek/workshop/sosialisasi	2.91
27	Informasi kediklatan bagi PNS	2.82
28	Prosedur ijin belajar dan tugas belajar	2.92
29	Pelayanan ijin belajar dan tugas belajar	2.91
	<b>IKM Unit Pelayanan</b>	<b>73,55</b>
	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>B</b>
	<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>	<b>BAIK</b>



Grafik 11

Dari tabel dan grafik dapat dilihat bahwa dengan Nilai 73.55 disimpulkan bahwa Kategorisasi Mutu Pelayanan “ B “ dan Kinerja Unit Pelayanan adalah BAIK. Jika dilihat dari Nilai Rara (NRR) unsur pelayanan, unsur yang memiliki Nilai tertinggi adalah unsur “Kemudahan pelayanan” (3,11), sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata terendah adalah unsur “Pelayanan Pengusulan Taperum” (2,77) dan Prosedur Mutasi Jabatan dana tau Tempat Kerja (2,77).

Faktor penghambat dari Indikator Kinerja Pencapaian IKP (Indeks Kepuasan Pegawai )Tahun 2015 ini adalah Quisioner IKM yang disebarkan belum semua materi pertanyaanya terisi/dijawab lengkap. Faktor Pendukung untuk mewujudkan indikator ini adalah partisipasi dari PNS Kabupaten Bantul dalam pengisian quisioner Indeks Kuisoner Pegawai dengan jujur dan adanya Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur meliputi kegiatan

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.

Strategi tahun yang akan datang adalah meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan mengadakan pelayanan satu pintu sehingga pelayanan menjadi terpusat dan sistem aplikasi kepegawaian secara terintegrasi dan tersentralisasi, serta selaras dengan kebijakan dan regulasi optimalisasi e-Government di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Bantul, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bantul membangun melalui Sistem Aplikasi Terpadu BKD Kabupaten Bantul (BKD Bantul Apps).

#### **3.4. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV**

Pada Tahun 2016 ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul mulai melaksanakan Perjanjian Kinerja oleh Eselon III sebanyak 5 (lima) orang dan Eselon IV sebanyak 11 orang. Berikut capaian Perjanjian Eselon III dan IV :



**Tabel 14**  
**Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2016**

No	Sekretaris/Kepala Bidang	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Sekretariat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan sumberdaya, kapasitas dan profesionalisme aparatur	Capaian Nilai AKIP	%	80	80.6	100.75
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	92	100	108.7

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Capaian nilai evaluasi kinerja	nilai	78	69.1	88.59
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Ketepatan waktu pengiriman	%	100	100	100
2	Bidang Administrasi dan Kesejahteraan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya administrasi dokumen kepegawaian	Persentase ketepatan realisasi usulan dokumen kepegawaian	%	100	76	76
			Up date data ASN	Persentase keakuratan data ASN	%	15	15	100
				Persentase ketepatan waktu verifikasi usulan tambahan penghasilan	%	95	98	103.16
3	Bidang Mutasi dan Kepangkatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya penataan pegawai	Persentase Penempatan ASN	%	100	124	124.00

		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase ketepatan pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun	%	100	90	90.00
4	Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase ketepatan waktu verifikasi penilaian angka kredit	%	100	90	90.00
			Meningkatkan disiplin dan pengembangan karir PNS	Penanganan disiplin ASN	%	100	100	100
			Terwujudnya kebutuhan pegawai	Prosentase pemenuhan kebutuhan aparatur	%	17	0	0
			Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai ANJAB	Persentase Penilaian potensi dan kompetensi	%	24	19	79.19

5	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi PNS	Prosentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	%	7	7	100
				Prosentase permohonan ijin belajar dan tugas belajar sesuai kompetensi PNS	%	97	97	93.81

**Tabel 15**  
**Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja (Kegiatan)</b>	<b>Target Tahunan</b>	<b>Realisasi Tahunan</b>	<b>Prosentase (%)</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya pembayaran telepon : 12 Bulan	100	100	100
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Telaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan : 32500 Lembar	100	100	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketatausahaan keuangan BKD berjalan dengan baik dan lancar : 12 Bulan	100	100	100
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan ketatausahaan BKD berjalan dengan baik dan lancar : 1050 Benda pos	100	80	80
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah : 105 Oh	100	60	60
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan kantor : 14 Macam	100	100	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa alat tulis kantor : 4 Paket	100	100	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : 100 Oh	100	100	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman : 870 OK	100	76	76

10	Penyediaan Jsa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya penyelesaian administrasi kendaraan dinas : 20 Dokumen	100	80	80
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : 15 Buku	100	100	100
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kegiatan ketatausahaan BKD berjalan dengan baik dan lancar : 88 Kali	100	68	68
13	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja : 8 Unit	100	100	100
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja : 20 Kali	100	100	100
15	Penyusunan IKM	Tersusunnya dokumen IKM : 2 Dokumen	100	100	100
16	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD : 5 Laporan	100	100	100
17	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Terlaksananya penyusunan capaian kkinerja dan ikhtisar kinerja SKPD : 1 Dokumen	100	100	100
18	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD : 1 Dokumen	100	100	100

19	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lancana : 630 Orang	100	100	100
20	Penanganan ijin bercerai PNS	Jumlah PNS yang mengajukan ijin perceraian : 15 Orang	100	100	100
21	Pengelolaan administrasi kesejahteraan PNS	Jumlah PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian karpeg, karis, karsu, ijin cuti dan taperum : 850 Orang	100	100	100
22	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai	Tersedianya data dan pengelolaan tata naskah kepegawaian : 11000 Dokumen kepegawaian	100	98	98
23	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Jumlah PNS Golongan III/a dan Pejabat Kepala SKPD, Eselon III, Eselon IV dan staf yang mengurus anggaran diatas Rp.500.000.000 : 9625 Orang	100	96	96
24	Kenaikan pangkat dan pensiun	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun : 1800 Orang	100	100	100
25	Pengelolaan data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	Jumlah entry data PNS yang naik pangkat dan pensiun : 1800 Orang	100	100	100
26	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai formasi : 3500 Orang	100	100	100
27	Seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama	Jumlah peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama : 48 Orang	100	90	90

28	Uji Kesehatan	Terlaksananya uji kesehatan bagi PNS yang mengalami masalah kesehatan : 31 PNS	100	65	65
29	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Mengetahui tingkat kompetensi dan kinerja PNS : 285 Orang	100	99	99
30	Penyusunan formasi jabatan / standar kompetensi jabatan	Jumlah SKPD yang disusun standar kompetensi manajerialnya : 7 SKPD	100	100	100
31	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah : 83 PNS	100	100	100
32	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran kasus disiplin : 15 Orang	100	80	80
33	Kesekretariatan Tim PAK jabatan fungsional	Terlaksananya proses penilaian angka kredit yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan penilaian yang berlaku : 7000 Orang	100	96	96
34	Penyusunan formasi pegawai	Tersusunnya Formasi jabatan berdasarkan analisa jabatan : 3008 Usulan formasi	100	97	97
35	Seleksi penerimaan Calon PNS	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Pertanian yang diangkat CPNS : 140 Orang	100	0	0
36	Seleksi Praja IPDN dan Monitoring	Jumlah peserta seleksi calon praja IPDN : 62 Peserta seleksi	100	100	100



37	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	Jumlah PNS yang tugas belajar dan mengajukan ijin belajar : 135 Orang	100	100	100
38	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural : 145 Orang	100	100	100
39	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional : 80 Orang	100	100	100
40	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis : 291 Orang	100	100	100
41	Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti diklat tugas dan fungsi : 22 Orang	100	95	95

### 3.5. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yaitu Pengelola Pegawai Negeri Sipil Bantul yang Profesional, Berkepribadian dan Sejahtera ditempuh melalui 2 (dua) misi, 2 (dua) tujuan, 3 (tiga) sasaran, 6 (enam) program serta 41 kegiatan. Analisis capaian kinerja akan dilihat berdasarkan pada capaian sasaran.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Badan Kepegawaian Kabupaten Bantul telah mempunyai anggaran dalam DPA Perubahan Nomor : 914/084/DPPA/PPKD/2016 tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp 4.205.254.895,00

### 3.5.1. Anggaran dan Realisasi APBD

Kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD pada tahun anggaran 2016 realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp 57.194.371.825,00 atau 96,31 % dari jumlah anggaran sebesar Rp 59.382.925.070,00,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 16**  
**Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2016**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp53.872.453.520,00	Rp52.402.292.832,00
2.	Belanja Langsung	Rp5.510.471.550,00	Rp4.792.078.993,00
	Jumlah	Rp 59.382.925.070,00	Rp57.194.371.825,00

### 3.5.2. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul . Anggaran pada Tahun 2016 sebesar Rp 5.510.471.550,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 4.792.078.993.00 atau 87 %.

**Tabel 17**  
**Anggaran dan Realisasi Kegiatan**  
**BKD Kab. Bantul Tahun 2016**

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>256.484.900</b>	<b>218.630.233</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.050.000	3.303.320
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,400,000	1,684.624
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5,500,000	2.832.900
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	37.380.200	32.249.005
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,709,000	2.707.500
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,185,700	9.604.800
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.250.000	9.221.725
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,900,000	3,389.800
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.100.000	8.119.000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	155.260.000	136.949.559

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	9.750.000	8.568.000
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>251.820.000</b>	<b>177.566.414</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	151.640.000	88.642.014
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.680.000	22.874.400
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.500.000	66.050,000
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>5.195.500</b>	<b>3.486.500</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.195.500	3.486.500
<b>IV</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.408.800</b>
1	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	1.550.000	1.330.300
2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	1.550.000	1.078.500
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>3.255.959.700</b>	<b>3.203.134.886</b>
1	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	248.143.450	221.712.440

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi
2	Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah	2.594.056.500	2.591.837.884
3	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	129.638.500	120.014.000
4	Ujian dinas dan penyesuaian ijazah	25.190.200	21.961.750
5	Uji kesehatan	20.410.000	11.003.000
6	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	238.521.050	236.605.812
<b>VI</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>1.737.911.450</b>	<b>1.186.852.160</b>
1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	260.792,000	156.052.850
2	Seleksi penerimaan calon PNS	160.756.000	5.091.250
3	Penempatan PNS	122.544.050	77.997.820
4	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai	68.320.000	65.203.200
5	Seleksi dan Penetapan PNS untuk tugas belajar	248.483.500	246.115.722
6	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	36.126.000	33.385.724
7	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	14.005.000	4.489.000
8	Seleksi Praja IPDN dan Monitoring	22.884.000	5.528.000

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi
9	Kenaikan pangkat dan pensiun	123.706.000	109.416.305
10	Penyusunan formasi pegawai	34.143.500	28.124.301
11	Pelaporan LP2P dan LHKPN	40.708.750	39.636.290
12	Pengelolaan administrasi kesejahteraan PNS	10.497.000	10.486.500
13	Kesekretariatan tim PAK jabatan fungsional	35.953.500	25.510.256
14	Pengelolaan data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	39.062.500	34.767.000
15	Penyusunan formasi jabatan/standar kompetensi jabatan	32.518.650	26.289.465
16	Penyusunan IKM	1.690.000	935.000
17	Penangan Ijin Bercerai PNS	2.926.000	2.655.550
18	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	482.795.000	315.167.927
	<b>Jumlah</b>	<b>4,205,254,895</b>	<b>3,868,687,736</b>

### 3.5.3. Anggaran dan Realisasi Per Indikator Sasaran

**Tabel 18**  
**Anggaran dan Realisasi Per-sasaran**  
**BKD Kabupaten Bantul Tahun 2016**

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1 Meningkatkan Kualitas Manajemen Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	Presentase	90	84	3.255.959.700	3.203.134.886	93.33%
2 Meningkatkan pelayanan prima kepegawaian	Meningkatnya pelayanan bagi aparatur	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	Presentase	73	73.55	1.737.911.450	1.186.852.160	100.75%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai bagian penutup dari Pelaporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016, disimpulkan bahwa secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2016 rata-rata telah tercapai **97.04** atau kriteria penilaiannya “**Sangat Tinggi**” .

Dan untuk pencapaian Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan kriteria penilaiannya “ Sangat Tinggi “, dan dapat disimpulkan untuk kriteria penilaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 ini dengan nilai rata rata **97.04** termasuk dalam kriteria penilaian “**Sangat Tinggi**”.

Dari seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan efisien, efektif dan ekonomis dan mencapai sasaran. Dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan sasaran dan kegiatan yang telah tercapai, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang konkrit antara lain :

- a. Melaksanakan Monitoring, evaluasi kegiatan setiap bulannya secara lebih intensif.
- b. Meningkatkan Koordinasi, intregrasi dan sinkronisasi antar bidang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.